

BAB IV

HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Riau

Kemiskinan merupakan suatu topik pembahasan yang menarik untuk diteliti dan senantiasa diperbincangkan pada berbagai kesempatan yang menyangkut pembangunan kesejahteraan masyarakat luas.

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau tahun 2012-2017 (Jiwa)

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kuantan Singingi	31.26	34.71	33.52	34.10	31.22	31.95
2	Indragiri Hulu	27.68	29.60	29.40	31.63	29.73	29.42
3	Indragiri Hilir	53.01	54.18	52.39	56.85	56.82	55.40
4	Pelalawan	38.28	43.55	42.67	47.53	45.35	44.40
5	Siak	21.04	23.21	22.54	24.81	24.86	26.83
6	Kampar	61.75	68.58	67.61	72.22	67.68	66.33
7	Rokan Hulu	53.55	59.85	58.29	64.74	67.42	69.24
8	Bengkalis	35.25	40.11	38.82	40	37.49	38.19
9	Rokan Hilir	44.02	47.47	46.07	49.13	52.40	53.19
10	Kepulauan Meranti	63.85	64.02	61.07	61.64	56.18	53.05
11	Pekanbaru	32.66	32.46	32.29	33.76	32.49	33.09
12	Dumai	14.11	13.72	13.62	14.97	13.76	13.53
	RIAU	476.46	511.47	498.28	531.39	515.40	514.62

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Riau

Jumlah penduduk miskin di Riau per 1 September 2017 mencapai angka 514.62 ribu jiwa, atau sekitar 7,41 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan data di tahun 2016, yakni 7,67 persen atau sekitar 515,40 ribu jiwa.

Pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2012-2017 cenderung fluktuatif dimana jumlah penduduk miskin terbanyak adalah pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 515,40 ribu jiwa. Sedangkan daerah dengan penduduk miskin terbanyak adalah Rokan Hulu seperti yang terlihat pada tabel 4.1. diatas.

4.1.2. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau

Tabel 4.2.

Tingkat IPM Provinsi Riau tahun 2012-2017 (Presentase)

No	Kabupaten/Kota	IPM					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kuantan Singingi	66.31	66.65	67.47	68.32	68.66	69.53
2	Indragiri Hulu	66.50	66.68	67.11	68	68.67	68.97
3	Indragiri Hilir	63.04	63.44	63.80	64.80	65.35	66.17
4	Pelalawan	67.25	68.29	68.67	69.82	70.21	70.59
5	Siak	70.45	70.84	71.45	72.17	72.70	73.18
6	Kampar	70.08	70.46	70.72	71.28	71.39	72.19
7	Rokan Hulu	64.99	66.07	67.02	67.29	67.86	68.67
8	Bengkalis	70.26	70.60	70.84	71.29	71.98	72.27
9	Rokan Hilir	65.09	65.46	66.22	66.81	67.52	67.84
10	Kepulauan Meranti	61.49	62.53	62.91	63.25	63.90	64.70
11	Pekanbaru	77.94	78.16	78.42	79.32	79.69	79.97
12	Dumai	71.07	71.59	71.86	72.20	72.96	73.46
	RIAU	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79

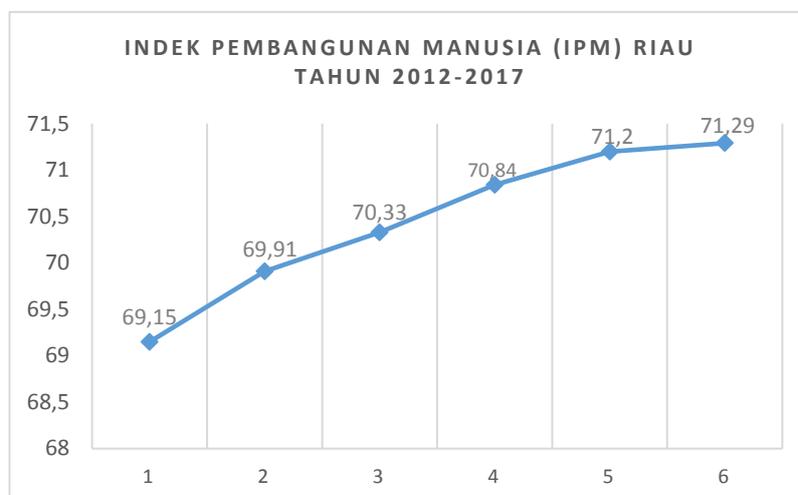
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Riau

Berdasarkan data pada tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa IPM Provinsi Riau mengalami peningkatan dimana daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Pekanbaru dengan tingkat IPM sebesar 79,97 pada tahun 2017. Sedangkan daerah dengan IPM terendah adalah Kepulauan Meranti dengan tingkat IPM sebesar 64,70.

IPM memiliki peranan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkannya kualitas hidup manusia maka akan meningkat, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pengurang terjadinya penduduk miskin. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-

rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Riau terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2017. IPM Riau meningkat dari 69,15 pada tahun 2012 menjadi 71,79 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Riau rata-rata tumbuh sebesar 0,64 persen per tahun.

Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2012-2017



Sumber: BPS Riau - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2017

4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau

Tabel 4.3.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2012-2017 (presentase)

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kuantan Singingi	5.93	5.47	5.14	-2.14	3.88	6,14
2	Indragiri Hulu	8.39	6.21	5.53	-2.94	3.68	4,53
3	Indragiri Hilir	7.91	7.17	6.88	2.04	4.84	2,88
4	Pelalawan	3.02	5.55	6.20	2.46	2.96	5,2
5	Siak	2.07	-2.33	-0.97	-0.21	0.35	-3,97
6	Kampar	5.82	6.31	3.43	1.09	2.80	3,43
7	Rokan Hulu	6.12	5.99	6.50	1.98	4.94	5,5
8	Bengkalis	-0.65	-3.27	-3.85	-2.74	-2.44	-3,85
9	Rokan Hilir	3.65	2.38	4.81	0.52	2.30	3,81
10	Kepulauan Meranti	6.70	4.24	4.45	2.85	3.22	4,45
11	Pekanbaru	7.82	5.59	6.90	5.57	5.96	3,90

12	Dumai	3.66	3.68	2.69	1.91	4.64	2,69
	RIAU	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23	2.71

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Riau

Berdasarkan data pada tabel 4.2. diatas terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi Riau mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan 3,76 persen Kenaikan ini mendai bahwa masyarakat terus berkembang sehingga kemungkinan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Namun pada tahun 2013 sampai 2017 kembali turun lagi yaitu dengan angka 2,71 persen.

4.1.4. Kondisi Pengangguran di Provinsi Riau

Tabel 4.4.

Jumlah Pengangguran Provinsi Riau tahun 2012-2017 (jiwa)

NO	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kuantan Singingi	1.90	3.92	6.13	2.60	4,86	6.50
2	Indragiri Hulu	4.70	3.82	3.97	4.82	7,28	4.73
3	Indragiri Hilir	5.40	2.98	4.27	7.16	5,41	4.08
4	Pelalawan	3.60	2.97	3.42	7.61	4,29	3.55
5	Siak	5.90	5.38	3.56	10.02	9,37	5.60
6	Kampar	8.60	6.20	6.10	8.07	7,23	5.93
7	Rokan Hulu	5.56	5.04	7.90	7.82	7,61	6.17
8	Bengkalis	4.40	7.02	7.30	10.08	8,36	8.62
9	Rokan Hilir	8.19	6.04	6.25	8.62	9,13	4.59
10	Kepulauan Meranti	8.63	6.99	11.76	9.37	6,7	4.54
11	Pekanbaru	8.10	6.66	9.20	7.46	8,23	8.91

12	Dumai	13.73	9.60	9.14	11.23	10,68	8.94
	RIAU	6.64	5.48	6.56	7.83	7,43	6.22

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Riau

Kondisi pengangguran di Riau sendiri mengalami fluktuasi di beberapa tahun belakangan ini, berdasarkan tabel 4.4, pengangguran tertinggi ada pada Kabupaten Dumai di tahun 2017 dengan jumlah pengangguran sebesar 8.94% sedangkan pengangguran terendah ada pada Kabupaten Pelelawan tahun 2017 sebesar 3,55%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Riau mencapai 188,4 ribu jiwa. Dengan jumlah pengangguran terbanyak berasal dari tamatan SMK. Dari hasil data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Februari 2018, ada sekitar 5,72 persen pengangguran dari total angkatan kerja per Febuari 2018 sebanyak 3,30 juta orang. Kaum sarjana yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi di Riau, ternyata juga banyak menganggur. Pengangguran terbanyak kedua berasal dari tamatan universitas. Angkanya sebesar 8,04%. Sedangkan pengangguran terbuka tamatan SMK sebesar 9,03%. Sementara untuk mereka yang berpendidikan rendah justru akan menerima pekerjaan apa saja. Oleh sebab itu tingkat pengangguran terbuka di tingkat SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan sebesar 4,24%. Dari data itu, SMK paling tinggi. Jadi, tamatan SMK malah lebih banyak menganggur. Sebesar 54,22% penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 0,24 % poin dibanding Februari 2017. Kemudian, Kategori Lapangan Pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah

Industri Pengolahan (0,95% poin), Administrasi Pemerintahan (0,83% poin), Perdagangan Besar dan Eceran (0,59% poin). Selanjutnya, Jasa Kesehatan (0,32 %poin), Informasi dan Komunikasi (0,28 %poin), Konstruksi (0,23 %poin), Jasa Pendidikan (0,20% poin), Pertambangan dan Penggalian (0,07%poin), Pengadaan Listrik dan Gas (0,04% poin), Real Estate (0.03%poin), dan Jasa Perusahaan (0,02 %poin). Angkatan kerja Provinsi Riau sendiri pada Februari 2018 sebanyak 3,30 juta orang. Penduduk bekerja di Provinsi Riau pada Februari 2018 sebanyak 3,11 juta orang.

4.1.5. Tingkat Inflasi di Provinsi Riau

Tabel 4.5.

Tingkat Inflasi Provinsi Riau tahun 2012-2017 (Presentase)

NO	Kabupaten/Kota	Tingkat Inflasi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pekanbaru	4,07	7,08	8,53	2,71	4,19	4,07
2	Dumai	3,78	6,65	8,53	2,63	3,98	4,85
3	Tembilahan	-	-	10,06	2,06	2,58	4,27
4	Riau	2,38	8,24	8,65	2,65	4,04	4,20

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Riau

Berdasarkan data pada tabel 4.5. diatas, tingkat inflasi Provinsi Riau dari tahun 2010-2017 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi pernah dicapai Kota Tembilahan pada tahun 2014 sebesar 10,06%, sementara itu, nilai inflasi terendah pernah dicapai Kota Tembilahan pada tahun 2015 sebesar 2,06%.

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik

dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun). Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai Inflasi karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro, baik fiskal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Pemilihan Model Regresi

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Adapun untuk memilih model mana yang tepat digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Hasil uji pemilihan model sebagai berikut :

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara *model common effect* dengan *model fixed effect* dengan uji hipotesis sebagai berikut:

a. H_0 : memilih menggunakan estimasi model *common effect*

b. H_a : memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*

Berikut adalah hasil uji chow yang dilakukan dengan aplikasi eviews 8.

Tabel 4.6.

Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	163.438883	(11,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	251.975241	11	0.0000

Berdasarkan uji chow diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di bawah $\alpha < 0,05$ yang berarti model yang relevan dari *model common effect* dan *model fixed effect* adalah *model fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Uji hipotesisnya yaitu :

a. H_0 : memilih menggunakan model estimasi random effect

b. H_a : memilih menggunakan model estimasi fixed effect

Untuk melakukan uji Hausman maka dapat melihat dari nilai P-value. Apabila p-value signifikan ($<5\%$) maka model yang digunakan adalah model

estimasi fixed effect. Sebaliknya bila p-value tidak signifikan ($>5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi random effect.

Tabel 4.7.

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.288907	4	0.0543

Berdasarkan hasil uji hausman test diatas menunjukkan bahwa probabilitas (0,0543) signifikan $<5\%$ yang berarti pemilihan model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

3. Estimasi Fixed Effect

Estimasi fixed effect adalah teknik pengestimasian untuk mengungkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep waktu yang sama. Selain itu, model ini juga dapat mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar variabel dan antar waktu.

Tabel 4.8

Hasil Regresi Utama Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau tahun 2012-2017

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	94.86227	105.0864	0.902707	0.0002
IPM (X1)	0.607908	1.425694	-0.426394	0.0079
Pertumbuhan Ekonomi(X2)	1.542540	1.108173	1.391967	0.0395
Pengangguran(X3)	-3.697900	1.798171	-2.056478	0.4152
Inflasi (X4)	7.344887	5.955907	1.233211	0.0234

$$Y_{it} = 125.2615 - 1.284664X_{1it} + 1.224557X_{2it} + 1.224557X_{3it} - 1.955613X_{4it}$$

Keterangan : l

Y = Jumlah penduduk Miskin di Provinsi Riau

β_0 = Koefisien Intersep

X1 = Koefisien pengaruh X1 (IPM) terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Riau

X2 = Koefisien pengaruh X2 (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Riau

X3 = Koefisien pengaruh X3 (Pengangguran) terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Riau

X4 = Koefisien pengaruh X4 (Inflasi) terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Riau

4.3. Evaluasi Regresi

4.3.1. Uji Determenasi (R²)

Tabel 4.9.

Uji Determinasi

R-square	0.859818
Adjusted R-square	0.672909
S.E of regression	9.337253
F-statistic	4.600187
Prob (F-statstic)	0.014270

R² = 0.859818 yang artinya bahwa sebanyak 85.98% variasi atau perubahan pada variabel jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi dari IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Tingkat Inflasi sedangkan sisanya 14,02% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.2. Uji Parsial (Uji F)

Tabel 4.10.
Hasil Uji F

R-square	0.859818
Adjusted R-square	0.672909
S.E of regression	9.337253
F-statistic	4.600187
Prob (F-statstic)	0.014270

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak mempengaruhi. F-stat sebesar 4.600187 dengan prob 0.014270 < alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variable

dependen. Uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi atau tidaknya masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Tabel 4.11.
Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	Probabilitas	Keterangan
IPM	0.607908	0.0079	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	1.542540	0.0395	Signifikan
Pengangguran	-3.697900	0.4152	Tidak Signifikan
Inflasi	7.344887	0.0234	Signifikan

4.3.4. Cross Effect

Sriyana (2014) bahwa Cross Effect diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut dimiliki oleh masing-masing unit atau individu.

Tabel 4.12.
Cross Effect

Kabupaten/Kota		Cross Effect
1	Kuantan Singingi	3984.119
2	Indragiri Hulu	2891.810
3	Indragiri Hilir	45649.84
4	Pelalawan	3292.414
5	Siak	-21563.46
6	Kampar	34514.38
7	Rokan Hulu	54227.59
8	Bengkalis	13214.41
9	Rokan Hilir	24155.51
10	Kepulauan Meranti	22451.51
11	Pekanbaru	-21573.41
12	Dumai	-78105.77

Pada tabel 4.12. menunjukkan nilai intersep dari masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2012-2017 adalah Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 54.227,59 jiwa. Yang artinya, saat variabel independen dalam kondisi ($X=0$). Daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah dengan nilai -78.105,77. Artinya Kota Dumai mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 78.105,77 saat variabel independen ($X=0$).

4.3. Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Berdasarkan hasil analisis uji yang dilakukan diatas baik itu menggunakan Uji Hausman dan Uji Chow konsisten memilih model estimasi yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Dilihat dari hasil estimasi model *Fixed Effect*, rata-rata jumlah penduduk miskin di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2012-2017, dilihat dari wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah rata-rata penduduk miskin sebanyak 54.227,59 jiwa jiwa.

4.3.1. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Provinsi Riau

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki probabilitas sebesar $0,0079 < (0,05)$.

Artinya adalah variabel IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Koefisien IPM diperoleh sebesar -1.284664, artinya apabila IPM naik sebesar 1 rasio, maka akan diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.260,643 jiwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Apalagi diketahui bahwa menurut data BPS Riau meningkat dari 69,15 pada tahun 2012 menjadi 71,79 pada tahun 2017.

Secara rata-rata IPM Riau tahun 2012-2017 tercatat tumbuh sebesar 0,64 persen per tahun. Salah satu alasan mengapa hubungannya positif antara IPM dengan Kemiskinan yaitu menurut laporan Pembangunan Manusia tahun 2016 yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa kemajuan di Indonesia belum memberi manfaat bagi semua orang. Imbasnya adalah kesenjangan berdampak pada kelompok atau daerah tertentu secara tidak proporsional. Korelasinya dengan Provinsi Riau adalah kesenjangan di Provinsi yang memiliki Indeks Rasio Gini 0,379 pada tahun 2014 dan turun 0,325 pada tahun 2017. Dilihat dari paparan yang telah disampaikan, maka kenaikan IPM tidakselalu mempunyai korelasi yang negatif dengan jumlah penduduk miskin seperti halnya Provinsi Riau.

4.3.2. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Riau

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa variable Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Riau memiliki probabilitas sebesar 0.4152>

(0,05). Hal tersebut sesuai dengan teori hipotesis dalam penelitian ini. Karena menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Dimana pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Chalid dan Yusuf, 2014). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga kemiskinan disuatu daerah justru juga mengalami penurunan. Dimana semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka secara relatif semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besarlah harapan untuk tidak mengganggu sehingga akan mendorong pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong

meningkatnya indeks pembangunan manusia (Putong, 2009). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan secara langsung sehingga pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kemiskinan.

4.3.3. Analisis Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Riau

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa koefisien jumlah pengangguran memiliki probabilitas sebesar $0,0395 < (0,05)$. Artinya adalah variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Koefisien Pengangguran diperoleh sebesar 1.224557, artinya apabila Pengangguran naik sebesar 1 rasio, maka akan diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.224557 jiwa.

Fakta lain juga bisa terjadi, yaitu pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah. Pada kelompok keluarga miskin ini, sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dilibatkan dalam bekerja dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga adanya kecenderungan tingkat pengangguran akan rendah. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah karena sebagian besar bekerja, namun mereka tetap miskin.

Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan

maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Kajian yang mendukung teori dan yang bertentangan dengan kajian ini dilakukan di Nigeria, misalnya Osinubi (2005) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

4.3.4. Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan Provinsi Riau

Berdasarkan model estimasi Fixed Effect, dapat dilihat dari tabel bahwa koefisien tingkat inflasi memiliki probabilitas sebesar 0.0234 signifikan pada tingkat alpha 5% (0.05) dengan koefisien sebesar -1.955613. Artinya, adalah variabel tingkat inflasi mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis awal peneliti yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.